

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan Pembangunan dan terciptanya Pemerintah yang baik (Good Governance) diperlukan adanya perumusan dan penyusunan Rencana Strategis yang jelas dan akurat.

Penyusunan Rencana Strategis tersebut juga merupakan suatu kerangka yang sistematis dan terinci serta disajikan dalam bahasa yang mudah dimengerti agar mudah dipahami oleh seluruh karyawan/karyawati dan masyarakat umum (Civil Society) serta sektor politik.

Rencana Strategis harus dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kualitatif maupun kuantitatif oleh instansi yang bersangkutan dan dapat dirasakan manfaat dan kegunaannya oleh masyarakat sebagai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu agar pemahaman dan pemikiran dalam Rencana Strategis dapat dilaksanakan secara mudah dan objektif maka perlu disusun Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Majene berlandaskan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mempertahankan dan atau meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Majene dalam menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang dinamis serta faktor-faktor yang berpengaruh dengan cepat maka model perencanaan strategis ini perlu dikembangkan yang pada intinya mengacu pada Visi, Misi dan Program yang berbasis pada analisa lingkungan strategis dan isu-isu strategis.

Renstra ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan peran serta para pihak dalam mengakomodir berbagai kepentingan yang berbeda, dan sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene Tahun 2012-2016 adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kab.Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Majene;
- l. Peraturan Bupati Majene Nomor Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Majene Tahun 2012-2016.

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Majene tahun 2012 dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene tahun 2012-2016.

Sedangkan Tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan dan program dalam periode 2012-2016 yang akan diambil dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan pembangunan pertanian dan peternakan dan sekaligus sebagai tolok ukur evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majene yang memuat Visi, Misi dan Program prioritas Pembangunan selama 2012-2016 sekaligus sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Peternakan tiap tahun. Penyusunan Renja, disamping mempedomani Renstra juga harus mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun.

ALUR PENYUSUNAN RENSTRA-SKPD (Permendagri 54 Tahun 2010)



SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA-SKPD

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK
SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dimana pemerintah daerah, baik propinsi, kabupaten dan kota diberi kewenangan untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, memerlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari pelaku di bidang kelembagaan pemerintah daerah dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam pola organisasi pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene antara lain telah dijelaskan bahwa dinas daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat sesuai kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Sehubungan dengan itu maka Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai salah satu Perangkat Daerah adalah :

**“ Melaksanakan Sebagian Tugas Pemerintah, Pembangunan dan
Pelayanan Masyarakat sesuai Kewenangan dibidang
Pertanian dan Peternakan “**

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- (a) Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis dibidang Pertanian dan Peternakan ;
- (b) Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum dibidang urusan pertanian dan peternakan ;
- (c) Pembinaan dan Pelaksanaan Administrasian dan Pelaporan tugas-tugas Pertanian dan Peternakan ;
- (d) Pengkoordinasian dan Pembinaan terhadap UPTD.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene sebagai berikut :

- (a) Kepala Dinas
- (b) Sekretaris :
 - (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - (3) Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (c) Kepala Bidang Tanaman Pangan :
 - (1) Kepala Seksi Perbenihan dan Budidaya Tanaman Pangan
 - (2) Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan ;
 - (3) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
- (d) Kepala Bidang Hortikultura :
 - (1) Kepala Seksi Perbenihan dan Budidaya Tanaman Hortikultura ;
 - (2) Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura ;
 - (3) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura .
- (e) Kepala Bidang Peternakan :
 - (1) Kepala Seksi Perbibitan dan Bididaya Ternak ;
 - (2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 - (3) Kepala Seksi Usaha Peternakan .

- (f) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian ;
 - (1) Kepala Seksi Pengelolaan Lahan ;
 - (2) Kepala Seksi Pengelolaan Air ;
 - (3) Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian.
- (g) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

2.2. SUMBER DAYA

1. Letak Geografis Kab. Majene

- ❖ Luas wilayah : 94.784 km², terletak pada koordinat 2°38' 45" – 3°38'15" lintang selatan dan antara 118° 45'15" – 119° 05' 45" bujur timur.
- ❖ Tinggi dpl : 0 – 1600 M
- ❖ Jumlah kecamatan : 8 (delapan) ; Banggae Timur, Banggae, Pamboang, Sendana, Tammerodo Sendana, Tubo Sendana, Malunda dan Ulumanda.

Secara administratif Kab. Majene berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

2. Keadaan Sumber Daya Tani

Kabupaten Majene mempunyai potensi komoditas pertanian yang terdiri atas pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Potensi tanaman pangan yang dikembangkan di Kabupaten Majene terdiri atas 8 komoditi yaitu padi sawah, padi ladang, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Komoditas yang paling luas areal pengembangannya adalah padi sawah dengan luas 1.263 Ha dengan produksi sebesar 8.654 Ton dan produktifitasnya sebesar 56,45 Kw/Ha. Sedangkan tanaman pangan yang paling kecil luas areal pengembangannya adalah kacang kedele 1 (satu) Ha dengan produksi sebesar 1 (satu) Ton dan produktifitas sebesar 8,89 kw/ha.

Sedangkan untuk tanaman hortikultura terdiri atas tanaman buah-buahan dan tanaman sayur-sayuran. Pada tanaman buah-buahan terdapat 17 jenis komoditi yang dikembangkan, namun yang paling banyak yang dikembangkan terdapat pada 5 komoditi andalan yakni Nenas 566.609 rumpun, Pisang 1.451.429 rumpun, Mangga 136.065 pohon dan Durian 67.657 pohon serta langsung 47.391 pohon. Produksi yang terbesar dari kelima komoditi tersebut adalah pisang 46.214 Ton, Mangga 10.817 Ton, Durian 8.514 Ton dan langsung 3.018 Ton serta Nenas 354 Ton. Sedangkan produktifitas dari kelima tanaman buah-buahan tersebut di atas yaitu pisang 0,19 kw/pohon, nenas 0.01 kw/rumpun, mangga 0,57 kw/pohon dan durian 1,53 kw/pohon serta langsung 62,74 kw/phn.

Pada tanaman sayuran terdapat 11 komoditi yang dikembangkan dan yang paling luas areal penanamannya adalah cabe rawit 118 ha, kacang panjang 107 ha, cabe besar 92 ha, terung 74 ha dan tomat 71 ha. Sedangkan produksi yang dihasilkan komoditi tersebut yaitu cabe rawit 216 ton, cabe besar 192 ton, kacang panjang 156 ton, tomat 138 ton dan terung 136 ton. Sedangkan produktifitas dari keempat tanaman sayuran tersebut di atas yaitu cabe rawit kw/ha, cabe besar 30,07 kw/ha, kacang panjang 25 kw/ha, tomat 33,00 kw/ha dan terung 24,59 kw/ha.

3. Keadaan Sumber Daya Ternak

Populasi untuk semua komoditi ternak mengalami kenaikan setiap tahun dengan rata-rata prosentase peningkatan sebagai berikut :

Ternak sapi 0,39 %, Kerbau 0,26 %, Kuda 0.07%, Kambing 0,02 %, Ayam Buras 0.003 %, Ayam Ras 0,01 %, dan ternak itik sebesar 0,02 %.

Adanya Peningkatan populasi ternak setiap tahunnya, ini disebabkan oleh adanya faktor pendukung antara lain :

- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani ternak untuk menerapkan teknologi dengan system pemeliharaan ternak secara intensif ;
- Meningkatnya kesehatan hewan /ternak melalui pelaksanaan kegiatan vaksinasi dan pengobatan ternak ;

- Dengan terlaksananya program kegiatan Perbibitan Ternak dan Pengembangannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka peningkatan produksi ternak mengalami juga peningkatan dan faktor-faktor yang sangat mendukung adalah :

- Berkembangnya kawasan usaha peternakan rakyat ;
- Tersedianya kawasan kebun hijauan makanan ternak (HMT) ;
- Meningkatnya pengetahuan petani ternak untuk memberikan pakan tambahan (Konsentraf) ;
- Meningkatnya pedagang pengumpul terutama ternak ayam ras (potong) produksinya dipasarkan di Kabupaten Majene.

4. Keadaan Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene pada tahun 2011 tercatat sebanyak orang, yang terdiri dari :

- Golongan I : - orang
- Golongan II : 18 orang
- Golongan III : 36 orang
- Golongan IV : 3 orang

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan dari Pegawai Negeri Sipil didinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene pada tahun 2011 sebagai berikut :

- Program Magister (S2) : 3 Orang
- Program Sarjana (S1) : 32 Orang
- Diploma (D3) : 2 Orang
- Diploma (D2) : 1 Orang
- SLTA Sederajat : 15 Orang
- SLTP : - Orang

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengurus bidang Pertanian dan Peternakan di mana jumlah penduduknya sekitar 55% bermata pencaharian di sektor pertanian dan peternakan.

Adapun Kinerja Pelayanan dari masing-masing Bidang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Tanaman Pangan

Dalam bidang tanaman pangan kewenangan ini meliputi sepuluh buah sasaran strategis, yang pelaksanaannya dilakukan oleh 3 Seksi yaitu :

- a. Seksi Pembenihan dan Budidaya Tanaman Pangan ;
- b. Seksi Sarana Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan ;
- c. Seksi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.

Sasaran strategis bidang kewenangan ini adalah sebagai berikut :

Dalam sasaran strategik ini, indikator-indikator kinerja beserta pencapaian targetnya adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Satuan	Target	Capaian	% Capaian
1.	Terlaksananya pengambilan dan pengolahan data produksi tanaman padi dan palawija	Tahun	1	1	83,30
2.	Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi pasca panen pengolahan hasil pertanian	Orang	30	30	99,77
3.	Terlaksananya kegiatan pengolahan irigasi partisipatif	Kecamatan	8	8	100
4.	Terlatihnya masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian	Orang	30	30	100

Dari ke-4 indikator kinerja di atas 2 kegiatan belum tercapai 100 persen.

- Mengatasi Kemampuan Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Kerawanan Pangan

Dalam sasaran strategik ini, indikator-indikator kinerja beserta pencapaian targetnya adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Satuan	Target	Capaian	% Capaian
1.	Terlaksananya peningkatan pemanfaatan lahan dan peningkatan infrastruktur pertanian	Paket	1	1	20,16
2.	Tersedianya data informasi pasar	Tahun	1	1	99,89
3.	Tersedianya data produksi tanaman padi dan palawija	Musim Tanam	2	2	94,51
4.	Tersedianya sarana dan prasarana pertanian, penangkar perbenihan, penyuluhan pertanian dan infrastruktur produksi, produktifitas pertanian	Paket	1	1	93,10
5.	Terlaksananya pengelolaan Dana DAK Bidang Pertanian	Paket	1	1	92,68

Dari ke-5 indikator kinerja di atas belum tercapai 100 persen.

Adapun rencana data luas tanam, data luas panen, data produksi dan data produktivitas untuk tahun 2012 s/d 2016 tanaman padi-palawija terdapat dalam lampiran Renstra ini.

2. Bidang Hortikultura

Dalam bidang hortikultura kewenangan ini meliputi sepuluh buah sasaran strategis, yang pelaksanaannya dilakukan oleh 3 Seksi yaitu :

- a. Seksi Pembenihan dan Budidaya Tanaman Hortikultura ;
- b. Seksi Sarana Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura
- c. Seksi Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura.

Sasaran strategik bidang kewenangan ini adalah sebagai berikut :

- Tersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian

Dalam sasaran strategik ini, indikator-indikator kinerja beserta pencapaian targetnya adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Satuan	Target	Capaian	% Capaian
1.	Terlaksananya pemberian sertifikasi bibit	Komoditi	3	3	100
2.	Terlaksananya pembangunan Green House di UPTD Podang	Paket	1	1	99,93

Dari ke-2 indikator kinerja di atas 1 indikator tercapai 100 persen.

- Meningkatkan Keragaman Produksi Pangan Masyarakat

Dalam sasaran strategik ini, indikator-indikator kinerja beserta pencapaian targetnya adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Satuan	Target	Capaian	% Capaian
1.	Terlaksananya penanaman sayuran dataran rendah dan tinggi	Ha	4	4	99,92
2.	Terlaksananya penanaman hortikultura nenas	Ha	20	20	99,84
3.	Terlaksananya penanaman hortikultura durian	Ha	50	50	96,97

Dari ke-3 indikator kinerja di atas belum tercapai 100 persen.

- Mengatasi Kemampuan Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Kerawanan Pangan

Dalam sasaran strategik ini, indikator-indikator kinerja beserta pencapaian targetnya adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Satuan	Target	Capaian	% Capaian
1.	Terlaksananya penyediaan benih/bibit tanaman hortikultura bermutu untuk mendukung agribisnis dan ketahanan pangan	Komoditi	3	3	99,70
2.	Terlaksananya penyediaan benih/bibit hortikultura bermutu untuk mendukung agribisnis dan ketahanan pangan	Komoditi	2	2	100
3.	Terlaksananya pengembangan bibit bawang merah	Ha	5	5	99,91
4.	Terlaksananya penanaman sayuran dataran tinggi dan rendah	Ha	4	4	100

Dari ke-4 indikator kinerja di atas 2 indikator tercapai 100 persen.

Untuk sasaran produksi hortikultura sayur-sayuran dan buah-buahan tahun 2012 s/d 2016 ada pada lampiran.

3. Bidang Peternakan

Dalam bidang hortikultura kewenangan ini meliputi sepuluh buah sasaran strategis, yang pelaksanaannya dilakukan oleh 3 Seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Perbibitan dan Bididaya Ternak ;
- b. Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
- c. Kepala Seksi Usaha Peternakan .

(1) Peningkatan Kesehatan Ternak

Indikator Kinerja, target dan realisasi sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. Realisasi Penetapan Kinerja Sasaran

No	Sasaran			Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	Ket
	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
1.	Terlaksananya pelayanan kesehatan ternak/hewan	kali	1	1	100	

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kesehatan baik pencegahan (vaksinasi) maupun pengobatan yang dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskesmas). Dalam memberikan pelayanan dilakukan dengan 3 (tiga) cara : 1) Aktif, 2) Semi dan 3 (tiga) Pasif, sedangkan obyek pelayanan adalah kelompok tani ternak dan masyarakat.

Selain dalam bentuk pelayanan kesehatan hewan (pengobatan dan vaksinasi) juga dilakukan penyuluhan tentang masalah kesehatan ternak, baik dalam pemeliharaan kesehatan maupun pencegahan penyakit menular ternak sehingga mereka dapat meningkatkan produksi ternak dan menekan angka kematian (mortalitas).

(2) Terbebasnya ternak dan wilayah/daerah dari penyakit endemik (virus rabies)

Indikator Kinerja, target dan realisasi sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. Realisasi Penetapan Kinerja Sasaran

No	Sasaran			Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
1.	Terbebasnya ternak dan wilayah/daerah dari penyakit endemik	kecamatan	4	2	75	

Dalam pengembangan dan peningkatan populasi ternak sering mengalami kendala, seperti masalah penyakit yang biasa menyerang ternak maupun manusia. Misalnya dengan adanya kasus gigitan anjing liar yang dapat menyebabkan penyakit anjing gila atau yang lebih dikenal dengan penyakit "rabies". Penyakit ini sangat meresahkan masyarakat khususnya yang memiliki ternak maupun manusia itu sendiri karena dapat menyebabkan kematian.

Kegiatan ini dilaksanakan di 2 (dua) kecamatan dari 4 (empat) target kecamatan yaitu Banggae Timur dan Banggae, sedangkan di kecamatan Pamboang dan Sendana tidak dilaksanakan disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana kegiatan juga belum ada laporan adanya kasus gigitan anjing liar. Pada kegiatan tersebut tidak ada target jumlah anjing liar (anjing tak bertuan) yang akan dimusnahkan mengingat sasaran (anjing liar) belum terdata populasinya, namun dalam pelaksanaannya terbilang efektif oleh karena sebagian masyarakat juga turut berpartisipasi dalam kegiatan eliminasi ini.

Melalui kegiatan ini, maka anjing liar akan dapat menurun jumlahnya dimana hewan ini merupakan vektor pembawa penyakit rabies sehingga dengan menurunnya populasi anjing liar juga akan menurunkan vektor

pembawa penyakit rabies sehingga akan memberikan rasa aman pada masyarakat dan peternak yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan populasi ternak di kabupaten Majene.

(3) Terkendalinya Penyebaran Penyakit Menular Ternak

Indikator Kinerja, target dan realisasi sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. Realisasi Penetapan Kinerja Sasaran

No	Sasaran			Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
1.	Terlaksananya pengawasan ternak yang keluar dan masuk daerah	Bulan	12	9	75	

Kegiatan ini dilaksanakan tidak sesuai target karena berdasarkan pada pencairan honor kegiatan yang hanya sampai pada bulan September 2011, dan selanjutnya pencairan dana kegiatan ini tidak dapat lagi dilakukan karena kegiatan tidak ada dalam DPA-Perubahan TA.2011 sebagai dasar pelaksanaannya akibat dari perubahan kelembagaan.

Pada pelaksanaan kegiatan pengawasan perdagangan ternak antar daerah, petugas memberikan pelayanan **biosecurity** (penyemprotan dengan menggunakan desinfektan) dan pemeriksaan dokumen menyangkut riwayat kesehatan ternak kepada peternak yang akan masuk di wil. Kab. Majene disamping itu petugas juga memberikan surat keterangan sehat/tidak sehat kepada pedagang ternak atau yang mengangkut ternak tersebut.

Apabila ditemukan ternak sakit dalam perjalanan yang merupakan penyakit ringan akan diberikan pertolongan pertama berupa pemberian vitamin dan pengobatan tetapi jika ternak yang melintas tersebut ditemukan penyakit menular (zoonosis) maka dengan terpaksa diberhentikan dan dilakukan tindakan pemusnahan atau tidak dibenarkan masuk/keluar wilayah

kabupaten Majene. Ternak yang melintas di kab. Majene pada tahun 2011 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. Jumlah Ternak/Bahan Yang Melintas dan Masuk di Kab.Majene Bl.Januari s/d September 2011

No	Ternak/Bahan Asal Ternak	Yang Melintas	Tujuan Kab. Majene		Total (ekor).	Ket
			Jumlah (ekor)	Persentase (%)		
1	2	3	4	5	6	
1	Ayam Ras	158.745	41.475	20,7	200.220	Kasus Nihil
2	Ayam Buras	3.618	52	1,4	3.670	Sda
3	Telur	25.220	27.805	52,4	53.025	Sda
4	Sapi	468	5	1,10	473	Sda
5	Kambing	5.918	271	4,4	6.189	Sda
6	Kerbau	11	2	15,4	13	Sda
7	Babi	57	-	-	57	Sda
8	Kuda	14	-	-	14	Sda
9	Itik	2.395	-	-	2.395	Sda
10	Anjing	166	-	-	166	Sda
11	DOC	300	-	-	300	Sda

Ctt : Ternak/ekor, telur/rak

Sumber : Data Pengawasan Lalu Lintas Ternak Tahun 2011

Dari hasil pengawasan lalulintas ternak selama tahun 2011 tidak didapatkan kasus adanya penyakit menular (zoonosis) baik ternak yang keluar dan masuk maupun yang melintas di wilayah kabupaten Majene, hal ini sesuai dengan tujuan kegiatan ini untuk menurunkan vektor pembawa penyakit dan terkendalinya penyebaran penyakit menular ternak sehingga akan memberikan rasa aman bagi masyarakat khususnya para peternak yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas peternakan.

(4) Menurunnya Mortalitas (Kematian) Ternak

Indikator Kinerja, target dan realisasi sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. Realisasi Penetapan Kinerja Sasaran

No	Sasaran			Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
1.	Terlaksananya kegiatan vaksinasi	kali	4	4 kali	100	

Seiring dengan maraknya pemberitaan baik melalui media cetak maupun elektronik tentang adanya laporan dari masyarakat akan adanya virus flu burung yang menyerang unggas terutama ayam maka untuk mencegah penyebarannya dilakukan vaksinasi dan pengobatan terhadap ternak terutama pada unggas. Selain itu penyakit ngorok (SE) yang dianggap cukup berpotensi pada ternak sapi sehingga dilakukan vaksinasi Septicemia Epizootica (SE) setiap tahun.

Pada pelaksanaan kegiatan vaksinasi dan pengobatan ternak dilapangan sempat menghadapi beberapa kendala diantaranya lambannya sebagian aparat pemerintah (aparat kecamatan, desa/kelurahan dan lingkungan) dalam merespon jadwal kegiatan vaksinasi dan pengobatan ternak yang telah dikirim sebelumnya kepada mereka sehingga sebagian ternak tidak mengindahkan / mengumpulkan ternaknya pada saat vaksinasi dan pengobatan disamping itu keterbatasan sarana dan prasarana vital dan penunjang seperti spoit otomatis, kendaraan operasional serta jumlah vaksin dengan dosis yang cukup masih terbatas sehingga masih ada ternak yang belum sempat diberi pelayanan vaksin. Namun demikian para petugas tetap melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab yang dilakukan 4 (empat) kali di 8 kecamatan sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga selama tahun 2011 tidak ada laporan dari masyarakat tentang adanya penyakit yang menyerang hewan/ternak hal ini sesuai dengan tujuan kegiatan yaitu untuk menekan angka kematian (mortalitas) sehingga populasi ternak dapat meningkat.

(5) Meningkatnya Populasi Sapi dan Kambing

Indikator Kinerja, target dan realisasi sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. Realisasi Penetapan Kinerja Sasaran

No	Sasaran			Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
1.	Meningkatnya populasi sapi dan kambing pada kelompok sasaran	ekor	14 ek Sapi, 50 ek kb	8 ek Sapi, 48 ek Kb	85	

Pada kegiatan ini diadakan bibit ternak berupa sapi jantan 2 (dua) ekor, sapi betina 6 (enam) ekor, kambing jantan 8 (delapan) ekor, kambing betina 40 (empat puluh) ekor. Dari realisasi kegiatan tersebut diatas target yang diencanakan tidak dapat tercapai 100% disebabkan adanya revisi kegiatan yang pada awalnya hanya berupa belanja modal dirubah untuk menambah belanja administrasi kegiatan yang otomatis merubah pagu anggaran untuk pengadaan ternak pada belanja modal . Namun demikian setidaknya dengan adanya pengadaan bibit tersebut menampakkan adanya kontribusi/perhatian pemerintah dalam peningkatan populasi ternak dan pemenuhan kebutuhan protein hewani yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

(6) Meningkatnya Populasi sapi dan kambing hasil IB

Indikator Kinerja, target dan realisasi sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. Realisasi Penetapan Kenerja Sasaran

No	Sasaran			Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
1.	Terlaksananya kegiatan Inseminasi Buatan (IB) sapi dan kambing.	Dosis	150 ds Sapi, 50 ds Kb	150 ds Sapi, 10 ds Kb	100% Sapi 20% Kb	

Pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) diawali dengan melakukan pendataan ternak, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keadaan akseptor IB (ternak betina) yang akan dilayani. Jumlah akseptor IB yang terdata sebanyak 823 ekor sapi dan kambing 40 ekor .

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan IB antara lain adalah ketepatan waktu pelaksanaan IB (pada saat ternak birahi) dan penyediaan semen beku (bibit ternak). Pada kegiatan ini disiapkan semen beku (straw) sebanyak 150 dosis untuk sapi dan 50 dosis untuk kambing, perincian jumlah dan jenis semen beku (straw) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. Jumlah dan Jenis Semen Beku pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Inseminasi Buatan) Tahun 2011

No	Semen Beku (Straw)	Jenis Bibit Ternak	Jumlah (Dosis)	Ket.
1.	Sapi	Simental	50	
		Limousin	50	
		Bali	50	
2.	Kambing	Peranakan Ettawa (PE)	10	

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jenis bibit ternak yang paling banyak digunakan adalah bibit sapi dengan hasil yang dicapai adalah :

- (1) Jumlah akseptor yang dilakukan Inseminasi Buatan (IB) sebanyak 150 ekor
- (2) Jumlah akseptor yang bunting sebanyak 111 ekor dan
- (3) Jumlah kelahiran sebanyak 39 ekor

Sedangkan hasil yang dicapai pada pelaksanaan IB kambing adalah :

- (1) Jumlah akseptor yang dilakukan IB sebanyak 10 ekor.
- (2) Jumlah akseptor yang bunting sebanyak 3 ekor dan
- (3) Jumlah kelahiran sebanyak 3 ekor

Dari penggunaan semen beku pada kegiatan Inseminasi ini sudah sesuai dengan yang direncanakan pada ternak Sapi, akan tetapi akseptor yang bunting masih sangat rendah. Sedangkan Inseminasi untuk ternak Kambing masih sangat rendah tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan hal ini disebabkan karena permintaan peternak untuk IB pada ternak kambing sangat kurang. Adapun kebuntingan yang diharapkan juga sangat kurang, hal ini menunjukkan bahwa masih perlu ketelitian dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) agar dapat menghasilkan akseptor yang bunting lebih banyak.

Akseptor yang bunting dan berhasil melahirkan masih sangat diperlukan perawatan dan pemeliharaan lebih lanjut agar dapat tumbuh dengan baik.

(7) Tersedianya Kebun Pakan Ternak

Tabel. Realisasi Penetapan Kenerja Sasaran

No	Sasaran			Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	Ket.
	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
1.	Terlaksananya penyediaan kebun pakan ternak.	Ha	1	-	-	

Pakan Hijauan Ternak adalah salah satu faktor pendukung dalam pengembangan ternak ruminansia terutama ternak sapi dan kambing. Untuk itu dalam rangka mendukung keberhasilan pengembangan peternakan dan penambahan populasi ternak di Kabupaten Majene maka disusunlah satu kegiatan yaitu Pembangunan Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT).

Dengan melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena target yang direncanakan tidak dapat terpenuhi, hal ini disebabkan karena tidak adanya jasa konsultan yang dapat melaksanakan kegiatan tersebut.

Data Populasi Ternak dan produksi daging dan telur tahun 2012 s/d 2016 terdapat dalam lampiran renstra ini.

4. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Pertanian diarahkan untuk mendukung terwujudnya Kementrian yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pertanian melalui penyelenggaraan birokrasi yang bersih dalam mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam mencapai sasaran produksi komoditas unggulan nasional.

Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian mulai ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten harus terkait langsung dan sinergis mampu mendorong pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian sebagian besar dilaksanakan dengan pola bantuan sosial dan dilaksanakan secara partisipatif, disamping masih ada yang dilaksanakan dengan pola kontraktual yang mengacu pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta ketentuan lain yang berlaku.

Tujuan :

1. Memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Mengendalikan laju alih fungsi lahan
3. Mendayagunakan lahan pertanian terlantar
4. Melakukan upaya konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan pertanian
5. Penguatan hak atas tanah
6. Melakukan upaya rehabilitasi jaringan air irigasi
7. Melakukan upaya pengembangan sumber air irigasi
8. Meningkatkan kualitas SDM pertanian di bidang prasarana dan sarana pertanian
9. Meningkatkan ketersediaan alat dan mesin pertanian
10. Meningkatkan kemampuan pengelolaan UPJA
11. Melakukan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP)
12. Melaksanakan fasilitasi penyediaan pupuk dan pestisida.

Sasaran :

1. Meningkatnya luas lahan pertanian dan intensitas pertanaman (pada komoditas semusim)
2. Terkendalinya laju alih fungsi lahan
3. Terwujudnya pendayagunaan lahan pertanian terlantar, konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan pertanian
4. Meningkatnya penguasaan hak atas tanah
5. Tercapainya pengembangan jaringan irigasi
6. Tercapainya pengembangan sumber air irigasi
7. Terwujudnya konservasi air dan terbangunnya kesadaran masyarakat pertanian terhadap dampak perubahan iklim
8. Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan pengelola air

9. Terwujudnya peningkatan koordinasi koordinasi kelembagaan dalam penanganan masalah lahan dan air
10. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM pertanian dibidang prasarana dan sarana pertanian
11. Terwujudnya peningkatan kemampuan pengelolaan UPJA
12. Terwujudnya pengembangan usaha agribisnis prdesaan (PUAP)
13. Terlaksananya fasilitasi penyediaan pupuk dan pestisida.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Sebagai tingkat satuan kerja perangkat daerah (sektor publik) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2012-2016 dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dan akibat yang akan timbul. Rencana kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene mencakup visi, misi, sasaran strategik dan indikator kinerja target yang dicapai.

Berdasarkan analisa SWOT faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan pertanian dan peternakan di Kabupaten Majene adalah sebagai berikut :

Lingkungan Strategi Internal :

Kelemahan (weakness)

- Mindset dan mental model
- Rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap peraturan / perundang-undangan.
- Rendahnya tatakelola yang baik (Good Governance)
- Kinerja aparaturnya kurang optimal
- Pengelolaan sarana penunjang belum optimal.
- Usaha peternakan masih bersifat tradisional.

Kekuatan (Strengths)

Faktor-faktor kekuatan internal yang dapat mendorong kepada kemajuan dan kelancaran organisasi adalah :

- Kelembagaan dan OTDA (dukungan perangkat hukum)
- Tersedianya anggaran dan pembiayaan
- Adanya sumber daya aparaturnya
- Perkembangan teknologi

Lingkungan Strategis Eksternal :

Peluang (Opportunities)

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat adalah :

1. Pertambahan jumlah penduduk (konsumen)
2. Diversifikasi pangan dan pengolahan hasil pertanian yang semakin meningkat.
3. Meningkatnya permintaan produk pertanian yang berkualitas.
4. Meningkatnya kebutuhan pemenuhan gizi asal ternak.
5. Meningkatnya teknologi pengolahan hasil
6. Meningkatnya kebutuhan pelayanan berkualitas.

Tantangan (Threats)

Tantangan adalah hal-hal yang dapat menghambat kepada keberhasilan program Dinas yaitu :

- Lambatnya kaderisasi pelaku agribisnis
- Degradasi SDA dan pemanasan global
- Era Perdagangan bebas
- Krisis ekonomi dan finansial secara global
- Terjadinya degradasi populasi dan genetik ternak
- Terbatasnya kemampuan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan.

Matriks Asumsi Strategik

	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Opportunities (Peluang)	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan Peraturan yang ada, maka dapat dijadikan dasar untuk menentukan Regulasi/Kebijakan bagi pelaku usaha tani dan lembaga profesi dan industri pertanian. - Dengan tersedianya anggaran dan pembiayaan maka fungsi sebagai fasilitator dapat terlaksana dalam rangkaantisipasi permintaan akan produk agribisnis - Dengan kualitas SDM yang ada dapat berfungsi sebagai motivator bagi pelaku agribisnis - Dengan SDM berkualitas kita bisa mengelola pasar terbuka - Rekayasa Budidaya dan teknologi terlindungi oleh undang-undang dan perangkat hukum - Dengan infrastruktur yang memadai akan tercipta stakeholders yang dinamis. 	<ul style="list-style-type: none"> - kinerja aparatur dan pelaku agribisnis belum maksimal - Sarana penunjang agar hasil pertanian berkualitas dan produksi pertanian meningkat masih terbatas. - Pasar terbuka tidak akan terkelola dengan baik karena kurangnya tenaga ahli - Rekayasa budidaya teknologi tidak akan optimal karena tidak terkoordinasi dengan baik - Stakeholders terganggu dinamikanya karena lemahnya pemahaman hukum.
	Ancaman	Tantangan
- Threats (Ancaman /Tantangan)	<ul style="list-style-type: none"> - Persaingan global serta pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global - Terjadi perubahan kondisi agroklimat yang memberikan dampak perubahan iklim - Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian - Penerapan sertifikasi produk agribisnis - Undang undang / perangkat hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dibeberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan - Penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah. - Memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta

	<p>akan meregulasi perdagangan bebas</p>	<p>perbenihan perbibitan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus. - Memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan. - Pemenuhan kebutuhan pangan, disamping pengembangan komoditas unggulan hortikultura dan peternakan.
--	--	---

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene antara lain telah dijelaskan bahwa Dinas Daerah mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat sesuai kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Sehubungan dengan itu maka Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai salah satu Perangkat Daerah adalah

“Melaksanakan Sebagian Tugas Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat sesuai Kewenangan dibidang Pertanian dan Peternakan”.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelayanan kebijaksanaan teknis dibidang Pertanian dan Peternakan
- b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan.
- d. Pengadministrasian dan Pelaporan.

Adapun permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi sebagai Dinas Pertanian dan Peternakan berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, baik itu dikalangan para petani maupun dikalangan aparatur pemerintah yang ada di lingkup dinas pertanian dan peternakan (petugas lapangan yang memberikan bimbingan teknis kepada para petani).
2. Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki untuk peningkatan produksi hasil pertanian.
3. Belum maksimalnya kontribusi hasil pertanian dan peternakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Majene.

3.2.TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi dan Misi adalah landasan penyelenggaraan program sebuah instansi/daerah. Visi dan misi tentu tidak untuk dijadikan simbol atau “kalimat berbingkai” yang tanpa makna.

Pengelolaan visi dan misi suatu daerah memerlukan kepemimpinan yang visioner. Yaitu pimpinan yang memiliki wawasan kedepan, memiliki motivasi, semangat, dan komitmen yang tinggi terhadap visi dan misi organisasi serta menganggap juga menjadi miliknya. Pemimpin yang visioner selalu mempunyai rencana, berorientasi kepada hasil; mengadopsi visi-visioner baru yang menantang, dibutuhkan dan bisa dijangkau, mengkomunikasikan visi-visioner tersebut, dan mempengaruhi orang lain sehingga arah baru mereka mendapat dukungan dan gambaran dari sumber daya yang mereka miliki.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih merupakan acuan dan pijakan tugas bagi unit kerja organisasi, para aparatur pemerintah yang mengemban tugas-tugas birokrasi, visi dan misi unit kerja organisasi harus mampu dijadikan sebagai sumber-sumber berfikir, bersikap dan bertindak. Oleh karena itu seharusnya visi dan misi unit kerja bisa dimaknai lebih jauh oleh para aparatur yaitu mampu membawa pada suatu konsekuensi tugas aparatur yang inspiratif, inovatif, kreatif, dedikatif, produktif dan prospektif.

Konsekuensi dari visi dan misi adalah tuntutan untuk mampu mengelola atau mengelola agar visi dan misi yang ada dapat diimplementasikan dan diberdayakan secara maksimal.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Berdasarkan kondisi obyektif daerah dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungan modal yang tersedia, maka visi pembangunan 2012 – 2016 adalah :

“Terwujudnya Kesejahteraan yang Adil dan Merata di Kabupaten Majene dalam Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Demokratis dalam Kehidupan Agamais dan Berbudaya”

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, rumusan misi pembangunan Kabupaten Majene 2012-2016 yang sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat dan aparatur pemerintah.
Tujuan : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat dan aparatur pemerintah.
Sasaran : Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme kerja masyarakat dan aparatur pemerintah.
2. Peningkatan akselerasi pembangunan bidang ekonomi, kesejahteraan, sosial politik dan keamanan.

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas politik dan keamanan.

Sasaran : Meningkatnya PDRB dalam menyokong perekonomian daerah.

3. Optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Tujuan : Optimalisasi pemanfaatan, pengelolaan dan peningkatan produksi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, perikanan sebagai salah satu upaya menurunkan kemiskinan.

Sasaran :

- Optimalisasi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung perekonomian daerah.
- Terlaksananya proses nilai tambah produk pertanian.
- Tersedianya komoditas unggulan daerah yang berdaya saing.
- Tersedianya jaringan pemasaran produk pertanian.
- Terwujudnya ketahanan pangan daerah.
- Penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan seluruh hasil pertanian secara komprehensif. .

Berdasarkan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2012-2016, maka Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene dalam mendukung dan mempercepat pencapaian visi dan misi tersebut akan menitikberatkan kegiatannya pada :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya penyuluh sebagai aparatur pemerintah melalui pendidikan dan latihan secara berjenjang agar dalam melakukan tugas dan fungsinya lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi pertanian dan peternakan.

3. Peningkatan optimalisasi pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam dan optimalisasi hasil pertanian melalui nilai tambah sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan petani.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN

Visi Kementerian Pertanian 2010 – 2014 yaitu :

“Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka kementerian pertanian menjabarkannya dalam misi, yaitu :

- 1) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.
- 2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.
- 3) Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.
- 4) Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.
- 5) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.
- 6) Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.
- 7) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.

- 8) Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional.
- 9) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.
- 10) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Selama lima tahun ke depan (2010-2014), dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu sebagai berikut :

- (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian pada periode lima tahun ke depan (2010-2014), Kementerian Pertanian akan lebih fokus pada peningkatan 39 komoditas unggulan nasional. Komoditas unggulan nasional tersebut terdiri dari 7 komoditas tanaman pangan, 10 komoditas hortikultura, 15 komoditas perkebunan, dan 7 komoditas peternakan. Komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. Komoditas Unggulan Nasional yang ada di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Komoditas	Pangan
Tanaman Pangan	Kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar
Hortikultura	cabe, bawang merah, pisang, durian
Perkebunan	kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, tebu
Peternakan	sapi potong, kambing

(2) Peningkatan Diversifikasi Pangan.

Diversifikasi pangan atau keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu strategi mencapai ketahanan pangan. Sasaran percepatan keragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang yang dicerminkan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) sekurang-kurangnya 93,3 pada tahun 2014. Konsumsi umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, pangan hewani ditingkatkan dengan mengutamakan produksi lokal, sehingga konsumsi beras diharapkan turun sekitar 3% per tahun. Data menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mengkonsumsi beras lebih banyak daripada asupan karbohidrat yang dibutuhkan, yakni mencapai 62,2% untuk tahun 2007. Menurut rekomendasi pada Widyakarya Pangan dan Gizi 2004 bahwa konsumsi padi-padian untuk mencukupi karbohidrat itu cukup 50% saja, dan sisanya umbi-umbian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.22 tahun 2009 menetapkan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Tujuan utama Perpres tersebut adalah meningkatkan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan, baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat, dengan melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini serta pengembangan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Disamping itu, juga perlu diupayakan ketersediaan aneka pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang menggerakkan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Termasuk di dalam Perpres tersebut adalah penguatan dan peningkatan partisipatif Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

(3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.

Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada dua hal yakni peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas produk pertanian (segar dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah produk pertanian yang mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (SNI, Organik, *Good Agricultural Practices*, *Good Handling Practices*, *Good Manufacturing Practices*). Pada akhir 2014 semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olah karet (bokar) sudah harus tersertifikasi dengan pemberlakuan sertifikasi wajib. Peningkatan jumlah olahan diukur dari rasio produk segar olahan. Saat ini, sekitar 80 % produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk segar sedangkan 20% dalam bentuk olahan sehingga nilai tambahnya sangat kecil. Pada akhir 2014 ditargetkan bahwa 50% produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk olahan.

(4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani secara otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan keluarga petani serta faktor-faktor non-finansial seperti faktor sosial budaya. Walaupun demikian, sisi pendapatan petani merupakan sisi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani, prioritas utama Kementerian Pertanian adalah upaya meningkatkan pendapatan petani.

Saat ini rata-rata pendapatan per kapita pertanian hanya sekitar Rp 4,69 juta per tahun. Pada tahun 2014 Kementerian Pertanian menargetkan pendapatan per kapita tersebut dapat meningkat menjadi Rp 7.93 juta per tahun. Hal ini berarti setiap tahun harus diupayakan kenaikan pendapatan 11,1 persen per tahun.

Nilai pendapatan petani dapat bersumber dari usaha pertanian dan usaha nonpertanian. Nilai pendapatan yang bersumber dari usaha pertanian akan diperoleh dari selisih nilai penjualan komoditas usahatani yang dihasilkan dengan biaya usahatani yang dikeluarkan. Nilai penjualan hasil usahatani akan ditentukan oleh volume produksi yang dihasilkan serta harga jual. Makin besar volume produksi yang dihasilkan makin besar pula volume fisik yang dapat dijual, di mana upaya peningkatan volume produksi ini merupakan hal yang sudah banyak dipaparkan pada saat mengupayakan target peningkatan produksi dan swasembada berkelanjutan. Sementara itu, walaupun komoditas pertanian berhasil ditingkatkan produksinya, hal tersebut hanya akan secara nyata meningkatkan nilai penjualan manakala harga jual paling tidak konstan atau lebih baik lagi kalau juga meningkat. Oleh karena itu hal fundamental yang perlu diupayakan dalam rangka peningkatan nilai jual ini adalah mempertahankan agar harga jual tidak mengalami penurunan.

Dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia, strategi yang akan dikembangkan Kementerian Pertanian selama periode 2010-2014 yang akan datang adalah **Tujuh Gema Revitalisasi**, yaitu :

1. Revitalisasi Lahan
2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan
3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana
4. Revitalisasi Sumber Daya Manusia
5. Revitalisasi Pembiayaan Petani
6. Revitalisasi Kelembagaan Petani
7. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

Sesuai pedoman dalam **Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP)**, setiap eselon I mempunyai satu program dan nama program mencerminkan nama eselon I, sehingga di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 12 program. Dua belas program yang dilaksanakan Kementerian Pertanian untuk periode 2010-2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
- 2) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
- 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
- 4) Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.
- 5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- 6) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
- 7) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 8) Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
- 9) Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani.
- 10) Peningkatan Kualitas Perkarantinaaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.
- 11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian.
- 12) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.

3.4.TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan

pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas :

a. Kawasan pertanian tanaman pangan;

1. Peruntukan budidaya tanaman padi sawah terdapat di Kecamatan Sendana dengan luas 280 Ha, Kecamatan Tubo Sendana seluas 60 Ha, Kecamatan Ulumanda 500 Ha, dan Kec.Malunda seluas 503 Ha;
2. Peruntukan budidaya tanaman padi ladang terdapat di Kecamatan Sendana seluas 300 Ha, Kecamatan Tammerodo Sendana seluas 250 Ha, Kecamatan Tubo Sendana seluas 100 Ha, Kecamatan Ulumanda seluas 300 Ha, dan Kecamatan Malunda seluas 300 Ha;
3. Peruntukan budidaya tanaman palawija terdapat di Kec. Banggae Timur seluas 200 Ha, Kec. Banggae seluas 300 Ha, Kec. Pamboang seluas 300 Ha, Kec. Sendana seluas 500 Ha, Kec. Tammerodo Sendana seluas 100 Ha, Kec. Tubo Sendana seluas 250 Ha, Kec. Ulumanda seluas 700 Ha dan Kec. Malunda seluas 500 Ha.
4. Kawasan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Malunda, Banggae Timur, Banggae, Pamboang, dan Kecamatan Tamero'do Sendana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 2.513 Ha.

b. Kawasan Pertanian Hortikultura;

Pengembangan kawasan tanaman Hortikultura diarahkan pada berkembangnya sentra produksi komoditas unggulan / andalan daerah dan nasional.

Luas kawasan pertanian Hortikultura kurang lebih 5.776 Ha, tersebar pada 8 (delapan) kecamatan terdiri atas :

- Kawasan Tanaman Buah
 - Nenas di Kec. Pamboang
 - Durian di Kec. Malunda dan Ulumanda
 - Langsat di Kec. Tammeroddo Sendana, Tubo Sendana dan Malunda.
 - Pisang di Kec. Pamboang, Sendana dan Tammeroddo Sendana.
 - Mangga di Kec. Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammerodo Sendana, Tubo Sendana, Malunda dan Ulumanda
- Kawasan Tanaman Sayuran dan Obat
 - Bawang Merah di Kec. Banggae Timur dan Sendana
 - Cabe Rawit di Kec. Tubo Sendana, Sendana, Pamboang, Tammeroddo Sendana, Malunda dan Ulumanda.
 - Kol/Kubis (sayuran dataran tinggi) di Kec. Ulumanda.
 - Kunyit di Kec. Pamboang dan Sendana.

c. Kawasan Peternakan.

Kawasan peternakan terdapat di:

- a. Lokasi Peternakan Sapi Terdapat Di Kecamatan Sendana, Tammero'do, Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda Dan Kecamatan Malunda.
- b. Lokasi Peternakan Kambing Terdapat Di Kecamatan Pamboang, Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Kecamatan Sendana, Tammeroddo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana.
- c. Lokasi Peternakan Unggas Terdapat di Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan

lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis dari masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Majene adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan antara produktifitas dan produksi pertanian dengan potensi produktifitas dan produksi yang dapat diperoleh dari masing-masing komoditas pertanian.
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan turunnya kuantitas produksi.
3. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi jalan produksi serta perbaikan jalan desa untuk kepentingan transportasi sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian.
4. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan khususnya lahan kritis.
5. Penurunan produktifitas akibat perubahan iklim/anomali iklim dan serangan hama penyakit tanaman dan ternak.
6. Penanganan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.

7. Belum efektifnya keberadaan penyuluh dalam membina potensi untuk meningkatkan produksi petani.
8. Pelestarian lingkungan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
9. Peningkatan ketahanan pangan melalui pengendalian karbohidrat alternatif.
10. Ancaman penyakit zoonosis seperti AI (Avian Influenza) anthrax dan rabies serta penyakit hewan menular lainnya.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD

VISI

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Majene sebagaimana disebutkan dan RPJM 2012-2016, maka dengan memperhatikan hasil Analisa Lingkungan Strategis dan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan serta sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Majene maka Visinya dapat dirumuskan sebagai berikut :

**” TERWUJUDNYA PERTANIAN TANGGUH DENGAN PENINGKATAN SUMBER
DAYA MANUSIA PELAKU AGRIBISNIS UNTUK MENGOPTIMALKAN
PENGELOLAAN AGROEKOSISTEM “.**

Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertanian Tangguh

Pertanian yang dilaksanakan secara efisien dan efektif dan dikembangkan secara berkelanjutan, berkerakyatan yang produksinya mempunyai daya saing.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Agribisnis

Mewujudkan petani yang memiliki kemampuan atau kapabilitas dalam memenuhi kebutuhan usaha sampingan dan mempunyai aksesibilitas terhadap sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan baik ditingkat on farm maupun off farm, serta mewujudkan pelaku agribisnis yang memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam melaksanakan penyediaan dan penyaluran sarana produksi, proses produksi (on farm) pengolahan hasil (agro processing) dan pemasaran hasil (off farm).

3. Optimalisasi Pengelolaan Agroekosistem

Pendayagunaan lahan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan kemampuan lahan dengan memanfaatkan komoditas pertanian yang sesuai dengan tingkat kesuburan lahan dan iklim setempat dalam pembudidayaannya sebagai salah satu upaya atau aktifitas penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat petani dipedesaan.

MISI

Berdasarkan Visi tersebut, dapat dirumuskan Misi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparat pertanian dan petani ;
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian dan peternakan;
3. Mendorong pertanian yang tangguh dan berkelanjutan ;
4. Memfasilitasi dan mendorong terbentuknya kawasan dan sentra produksi Pertanian dan Peternakan ;
5. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian dan peternakan selaras dengan semangat otonomi daerah ;

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

TUJUAN :

1. Menyelenggarakan pengolahan data statistik pertanian
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan masyarakat dan aparat pertanian.
3. Meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan.
4. Membentuk kawasan sentra produksi unggulan yang prospektif.
5. Meningkatkan penggunaan teknologi terapan.
6. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pengolahan hasil.
7. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat

SASARAN :

1. Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah melalui diklat struktural dan fungsional secara berjenjang.
2. Meningkatnya PDRB dalam menyokong perekonomian daerah.
3. Optimalisasi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi SDA dalam mendukung perekonomian daerah
4. Terlaksananya Proses nilai tambah produk pertanian
5. Tersedianya komoditas unggulan daerah yang berdaya saing
6. Terwujudnya ketahanan pangan daerah
7. Optimalisasi sumber daya lahan dan air.

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI :

1. Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Ketahanan Pangan bertujuan untuk memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal.

Sasaran yang ingin dicapai :

- a. Tercapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal.
- b. Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat.
- c. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.

2. Pengembangan Agribisnis

Program Pengembangan Agribisnis bertujuan untuk memfasilitasi :

- a. Berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik dipasar domestik maupun internasional.
- b. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDRB.

3. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani. Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani.
- b. Semakin kokohnya kelembagaan petani.
- c. Meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif.
- d. Meningkatnya pendapatan petani.

KEBIJAKAN :

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Revitalisasi Pertanian
2. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
3. Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Petani.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rencana Program untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. Rencana Target Penerimaan PAD Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Majene Tahun 2012-2016

No.	Uraian	T A R G E T (Rp.)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	UPTD Podang					
	- Penjualan Hasil Pertanian	29.500.000	29.600.000	29.700.000	29.80.000	29.900.000
2.	Retribusi Rumah Potong Hewan	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000

- Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok, Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (sektor Publik), Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2012-2016 dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dan akibat yang akan mungkin timbul.

Dalam jangka menengah 2012-2016 Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dan peternakan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka disusunlah Rencana Program Tahunan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene yang terdiri dari beberapa indikator kinerja yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun rincian Indikator kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel 6.1 sebagai berikut :

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene tahun 2012-2016 merupakan rumusan Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Pertanian, sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene tahun 2012-2016 menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, sehingga dapat diwujudkan dan menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Kerja Tahunan dimasa yang akan datang. Diharapkan Renstra ini dapat disinergikan dengan instansi terkait, pihak swasta dan gerakan-gerakan kemandirian masyarakat pada umumnya dan masyarakat pertanian pada khususnya dalam menciptakan dan berupaya mewujudkan pembangunan pertanian yang terpadu, sehingga efisiensi dan efektifitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi kinerja dapat diwujudkan.

******* LAMPIRAN – LAMPIRAN *******